

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEDEPUTIAN INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI
TAHUN ANGGARAN 2014**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**JAKARTA
2015**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, penyusunan LAKIP Kedeputian Informasi Pemasarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Kedeputian IPS ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Melalui LAKIP 2014 ini, dituangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya guna mencapai sasaran dan program Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi yang didukung oleh pelaksanaan kegiatan di tahun 2014, sesuai Rencana Strategis BSN Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2012 – 2014.

Akhir kata, diharapkan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta pemicu peningkatan kinerja di lingkungan kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi.

Jakarta, Februari 2015

Deputi Bidang Informasi dan Pemasarakatan
Standardisasi

Dewi Odjar Ratna Komala

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Tugas Pokok, Fungsi	1
A. Struktur Organisasi Kedeputian IPS	2
B. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Kedeputian IPS	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	4
A. Rencana Strategis 2010 - 2014	4
B. Penetapan Kinerja Kedeputian IPS	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Kinerja Proses	10-15
B. Pencapaian Kinerja	16-21
C. Akuntabilitas Keuangan	24-25
BAB IV PENUTUP	26
 LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistemik, serta evaluasi pencapaian kinerja untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) BSN Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis BSN Tahun Anggaran 2010-2014.

Penyusunan LAKIP Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) BSN Tahun Anggaran 2014 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014. Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu meningkatnya persepsi dan partisipasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung terciptanya budaya standar, dengan tiga indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon 1 yang meliputi : 1) Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, 2) Indeks kepuasan pelanggan, 3) Indeks persepsi masyarakat terhadap standardisasi. Sasaran dan Indikator kinerja utama ini diwujudkan melalui pelaksanaan program pengembangan standardisasi nasional dan dua kegiatan, yaitu peningkatan informasi dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.

Capaian kinerja Kedeputian IPS pada tahun 2014 : (a) Jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, meningkat 32,34 % (melebihi target peningkatan 10% per tahun), dari 510.587 orang di tahun 2013 menjadi 664.064 orang di tahun 2014. ; (b) Indeks kepuasan pelanggan terhadap 2 jenis layanan jasa standardisasi, yaitu jasa informasi standardisasi dan jasa diklat standardisasi mencapai 81,36 (masuk dalam kategori “BAIK”) sesuai target 80 yang ditetapkan BSN (c) Indeks persepsi masyarakat terhadap standardisasi di tahun 2013 mencapai 67,67 , namun masih di bawah target (indeks 75) yang ditetapkan. Kemungkinan secara tidak langsung, hal ini terkait dengan menurunnya pagu anggaran Kedeputian IPS tahun 2014 yang cukup signifikan 58,2% dari Rp. 14.699.329.000,- menjadi Rp. 9.621.856.000,- yang mengakibatkan berkurangnya intensitas kegiatan pemasyarakatan standardisasi.

Penyerapan anggaran tahun 2014 adalah Rp. 9.491.683.813,- (98,65%) dari pagu Rp. 9.621.793.000,- Adapun penerimaan PNBPN untuk layanan jasa informasi standardisasi sebesar Rp. 1.239.249.264,- , naik 21,32 % dari target Rp. 1.021.454.700,- sedangkan untuk layanan jasa diklat standardisasi sebesar Rp. 1.086.557.500,- , naik 0,05 % dari target Rp. 1.086.000.000,-

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan 3
Tabel 2	Penetapan target Kedeputian IPS Tahun 2014 5
Tabel 3	Unsur Indikator Kinerja Utama Masyarakat Yang Peduli Terhadap Standardisasi 6
Tabel 4	Pengkategorian Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan 8
Tabel 5	Tahap Pengukuran Indikator Indeks Persepsi Masyarakat 8
Tabel 6	Program dan Kegiatan Lingkup Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi 10
Tabel 7	Kegiatan dan Output kegiatan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi 11
Tabel 8	Kegiatan dan Output kegiatan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 13
Tabel 9	Capaian IKU 2013 – 2014 dan Target IKU 2013 – 2014 16
Tabel 10	Mekanisme pelaksanaan survei di Kedeputian IPS 17
Tabel 11	Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi dan Layanan Jasa Diklat Standardisasi 17
Tabel 12	Capaian dan Target Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi dan Layanan Jasa Diklat Standardisasi Tahun 2013 – 2014 18
Tabel 13	Perbandingan Survei Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Standardisasi .. 19
Tabel 14	Capaian IKU IPS Tahun 2014 24
Tabel 15	Perbandingan Kinerja Anggaran Kedeputian IPS Tahun 2013 – 2014 25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Kedeputian IPS	2

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 113, Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.

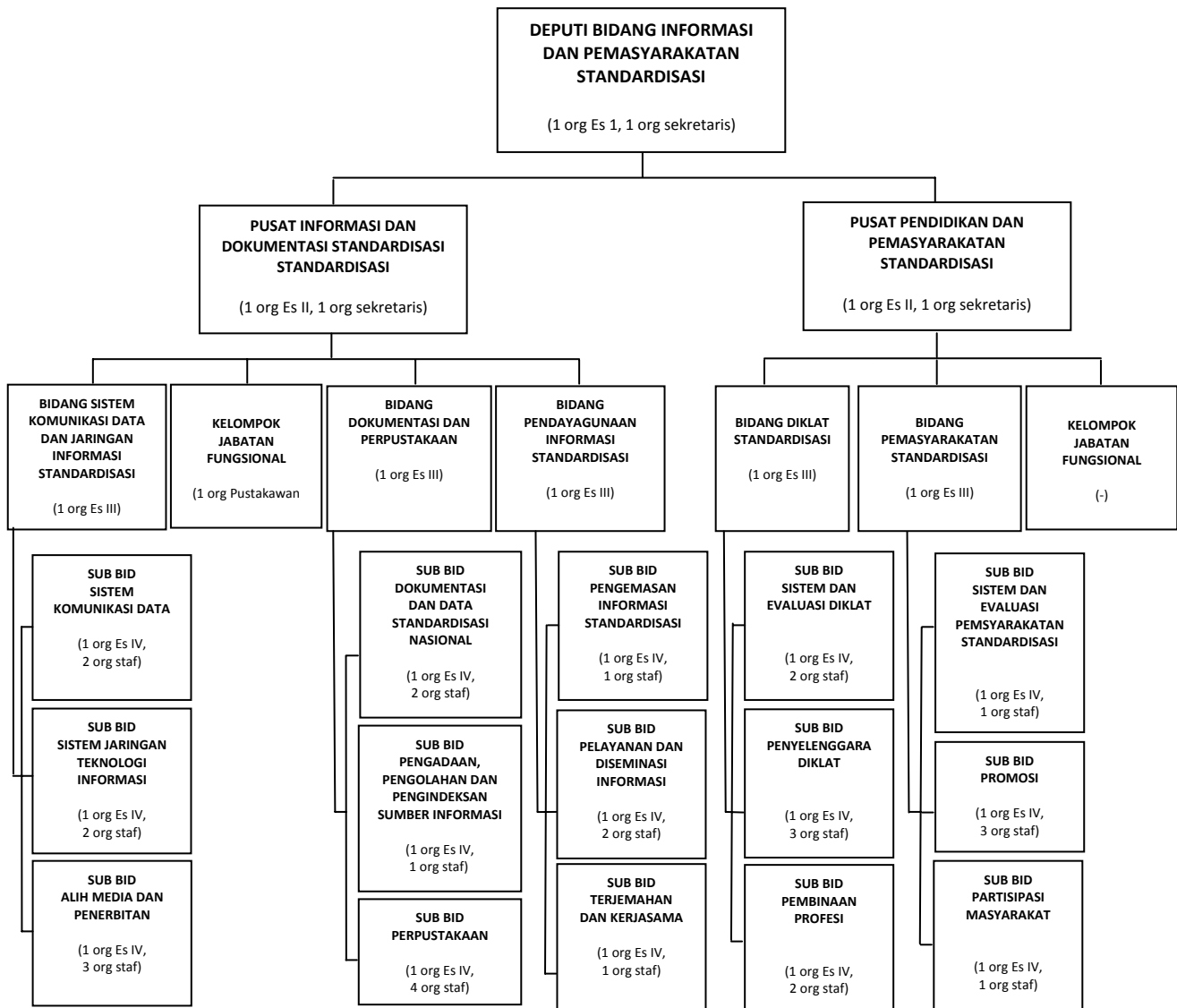
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

A. Struktur Organisasi Kedeputusan IPS

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2014 Kedeputusan IPS memiliki personel sebanyak 54 orang, terdiri dari 1 orang Eselon I, 2 orang Eselon II, 5 orang Eselon III, 15 Orang Eselon IV, 1 orang Fungsional Pustakawan dan 30 orang Staf dengan rincian sesuai Struktur Organisasi berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kedeputusan IPS

B. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Kedeputian IPS

Pada tahun 2014, jumlah personel kedeputian IPS mengalami penambahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2013, hal yang didapat melalui proses mutasi pegawai maupun adanya penambahan CPNS baru dengan Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.
Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					Σ Total
		S3	S2	S1	S0	SMA	
1.	Eselon I	-	1	-	-	-	1
2.	Eselon II	-	2	-	-	-	2
3.	Eselon III	-	4	-	-	-	4
4.	Eselon IV		5		-	1	6
5.	Fungsional Pustakawan	-	-	1	-	-	1
6.	Staf	-	-	29	3	8	40
	Σ Total		12	30	3	9	54

Jumlah personel aktif di Kedeputian IPS mengalami peningkatan sebanyak 8 orang dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu dengan adanya pengisian jabatan struktural eselon III dan IV di Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi, untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan yang sedang tugas belajar serta penambahan 9 orang CPNS baru dan rotasi 2 orang staf ke unit kerja lain di luar kedeputian IPS.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 06/KEP/BSN/2/2013 tentang Perubahan atas peraturan kepala BSN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis BSN Tahun 2010-2014, maka rencana strategis Kedeputian IPS tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut :

Visi Kedeputian IPS

Membangun budaya standar

Misi

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, minat dan peran serta masyarakat di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, melalui :

- pemanfaatan akses dan sistem informasi, publikasi, diseminasi dan layanan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- pemasyarakatan, pendidikan serta layanan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Tujuan

Meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran Strategis

Meningkatnya persepsi dan partisipasi masyarakat di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Kebijakan

Membangun budaya standar dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan dokumentasi; serta pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Program

Pengembangan Standardisasi Nasional, yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu :

- a. Pengembangan informasi dan dokumentasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Pendidikan, Pelatihan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

B. Penetapan Kinerja Kedeputian IPS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di setiap unit eselon 1, maka diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan penetapan target kinerja 2014 yang tertuang dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, yaitu :

Tabel 2.
Penetapan target Kedeputian IPS tahun 2014

Indikator Kinerja Utama	Target
Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	10% dari capaian tahun sebelumnya
Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Standardisasi	80 (Skala 100)
Peningkatan Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Standardisasi	75

1. Persentase Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi

Unsur Indikator Kinerja Utama dari masyarakat yang peduli terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian :

Tabel 3.

Unsur Indikator Kinerja Utama Masyarakat Yang Peduli Terhadap Standardisasi

Unsur Indikator	Sub Unsur Indikator	Satuan
1. Jumlah Pengguna Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1.1 Jumlah pemanfaat paket informasi standardisasi (<i>on line dan off line</i>)	orang
	1.2 Jumlah pengguna layanan informasi & dokumen standar	
	1.3 Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi	
2. Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2.1 Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa)	orang
	2.2 Jumlah peserta pelatihan standardisasi (Instruktur & peserta)	
	2.3 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian (peserta e-ballot, anggota MASTAN, Fasilitator dan Penerap SNI yang menjadi peserta SNI Award)	

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam indikator ini adalah pemangku kepentingan (stakeholders) Standardisasi, yaitu Pemerintah (Regulator); Pelaku Usaha (Industri); Pakar (Tenaga ahli/Akademisi) dan Publik (masyarakat umum/konsumen). Di mana bentuk kepeduliannya diukur dari tingkat partisipasinya di dalam kegiatan Standardisasi.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Persentase Masyarakat yang peduli Terhadap Standardisasi :

$$\% P = \frac{(\sum P_n - \sum P_{n-1})}{\sum P_{n-1}} \times 100 \%$$

- P = Jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi
- ΣP_n = Jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi di tahun berjalan, terdiri dari :
- Jumlah pengguna informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (*output* kinerja dari PUSIDO)
 - Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (*output* kinerja dari PUSDIKMAS)
- ΣP_{n-1} = jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi di tahun sebelumnya

2. Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi

Indeks kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Responden diambil bervariasi, seperti di perpustakaan dengan cara acak (*accidental random sampling*) yaitu dengan memberikan kuesioner kepada pengunjung yang datang untuk menggunakan layanan jasa perpustakaan BSN, dan pada layanan jasa diklat standardisasi, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh peserta pelatihan dan input dari institusi pengguna jasa pelatihan (kualitatif hasil temu pelanggan). Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Pelanggan adalah sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

$$IKM \text{ Unit Pelayanan } \times 25$$

Adapun Pengkategorian dari nilai indeks kepuasan pelanggan adalah sebagaimana tertuang pada tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Pengkategorian Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan

Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan	Kategori
20,00 – 36,00	Sangat Tidak Baik
>36,00 – 52,00	Tidak Baik
>52,00 – 68,00	Cukup Baik
>68,00 – 84,00	Baik
>84,00 – 100,00	Sangat Baik

3. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap standardisasi

Pemasyarakatan standardisasi dilakukan untuk meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi. Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap kegiatan standardisasi, adalah melalui survei. Survei ini ditujukan terhadap *stakeholder* BSN yang terdiri dari unsur regulator, akademisi, pelaku usaha dan konsumen secara umum yang tersebar di lokasi yang ditentukan terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diselenggarakan oleh BSN.

Pengukuran indikator indeks persepsi masyarakat terhadap standardisasi terdiri dari tahapan sebagaimana dijelaskan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Tahapan Pengukuran indikator indeks persepsi masyarakat

TAHAPAN	ELEMEN TAHAPAN
Pengenalan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui apa itu standardisasi - Mengetahui apa itu SNI dan arti tanda SNI - Mengetahui adanya penerapan tanda SNI pada produk - Mengenal BSN dan SNI

Pemahaman	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami apa itu standardisasi - Memahami peran standardisasi dalam perdagangan - Memahami arti tanda SNI - Memahami manfaat menerapkan SNI
Ketertarikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tertarik mengikuti kegiatan standardisasi • Tertarik berpartisipasi dalam Tenaga Ahli Standardisasi • Tertarik untuk berpartisipasi dalam perumusan SNI • Tertarik untuk membeli produk dengan mempertimbangkan tanda SNI • Tertarik untuk menerapkan SNI dalam produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha

Dalam survei ini, metodologi yang digunakan pada pengambilan sampel adalah *stratified random sampling* (metode sampling acak stratifikasi) dari penyebaran kuesioner di beberapa kota besar di Indonesia, dengan mempertimbangkan heterogenitas populasi yang ada dan *non purposive sampling* yaitu pengambilan sampel tidak mempertimbangkan apakah responden sudah/belum pernah mengikuti kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh BSN . Sedangkan Metode analisa yang digunakan adalah analisa statistika deskriptif, tabulasi silang serta analisis multivariabel.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kinerja Proses

Pencapaian Indikator Kinerja Kedeputan Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi didasarkan pada kontrak penetapan kinerja tahun 2014, yaitu:

1. Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi
2. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi
3. Peningkatan Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Standardisasi

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut di atas, Kedeputan Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi telah menetapkan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.
Program dan Kegiatan
Lingkup Kedeputan Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

Program	Kegiatan	Unit Organisasi
Pengembangan Standardisasi Nasional	Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
	Pendidikan dan pemasyarakatan Standardisasi	Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Tabel 7
Kegiatan dan Ouput Kegiatan
Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 2014

Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Output kegiatan
<p>1. Informasi Standardisasi</p> <p>1.1 Pengembangan alat akses informasi standardisasi</p> <p>1.2 Penyusunan pedoman publikasi SNI;</p> <p>1.3 Pengembangan koleksi standardisasi;</p> <p>1.4 Pengembangan layanan dan tata kerja dokumentasi dan perpustakaan;</p> <p>1.5 Pengelolaan informasi SNI dan referensi standardisasi;</p> <p>1.6 Kajian layanan perpustakaan;</p> <p>1.7 Pengembangan SNI Corner;</p> <p>1.8 Promosi Layanan standar</p>	<p>8 paket</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Senarai; • Katalog SNI dan Katalog Referensi. <p>Draft Pedoman publikasi SNI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koleksi SNI • Koleksi referensi standardisasi <ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan digital; • Pengembangan prosedur kerja dokumentasi dan perpustakaan; • Pengembangan profesionalisme <ul style="list-style-type: none"> • Data bibliografi thesaurus descriptor SNI; • Abstrak SNI; • Pemutakhiran basis data; • Anotasi bahan pustaka. <p>Hasil kajian kepuasan pelanggan.</p> <p>2 Outlet SNI corner (ITS dan BPSMB Jember)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar tentang standar sebagai referensi dalam pendidikan dan bisnis; • Bedah buku standardisasi.
<p>2. Penguatan Jejaring Informasi Standardisasi</p> <p>2.1 Pengemasan informasi standardisasi;</p>	<p>7 simpul jejaring & diseminasi kemasan informasi</p>	<p>7 jenis kemasan informasi yang terdiri dari : Brosur 5 judul, buletin 5 judul, poster 6 judul, flyer 1 judul, kalender meja tahun 2015, booklet: 1 judul, buku 1 judul</p>

<p>2.2 Pengembangan dan pembinaan kerjasama informasi standardisasi;</p> <p>2.3 Terjemahan dan alih bahasa;</p> <p>2.4 Diseminasi informasi standardisasi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan 7 simpul Jejaring INSTANET baru di 3 kota, dari 154 menjadi 161 simpul • Peningkatan kompetensi Petugas Layanan di simpul Jejaring INSTANET (UPT IPB Bogor, UPT ITS Surabaya, dan Jakarta) <p>16 dokumen SNI yang dialih bahasakan sesuai permintaan pengguna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.426 eksemplar kemasan informasi yang disebar ke 10.021 alamat; • 4 paket diseminasi informasi melalui pameran.
<p>3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</p> <p>3.1 Pengembangan aplikasi sistem informasi</p> <p>3.2 Pemutakhiran data dan informasi standardisasi</p> <p>3.3 Pengembangan Sistem dan Keandalan Jaringan TI</p>	<p>1 Aplikasi baru</p> <p>3 aplikasi pemeliharaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email Blast; • Pemesanan SNI Online; • Sistem Registrasi Diklat Online; • Sistem e-Learning standardisasi; • Sistem aplikasi akreditasi LPK online; • Interoperability aplikasi standardisasi dan penilaian kesesuaian BSN-KAN. <p><u>Catatan :</u> Ditambah dengan 2 pengembangan aplikasi yang mendapatkan dukungan anggaran dari EU Trade Support Programme tahap 2 dalam bentuk hibah, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koleksi elektronik dokumen SNI dan non SNI; • Jajak pendapat (RSNI3) dan pemungutan suara (RSNI1); • Data Pemanfaatan SNI Online • Alihmedia dan Publikasi SNI; • Peningkatan kompetensi personel pengelola data/informasi standardisasi berbasis elektronik • Pengembangan Jaringan TI BSN di Gd. Manggala Wanabakti dan Gd. I BPPT (yang didukung dengan pagu anggaran rutin BSN)

3.4 Pengembangan Tata Kelola TI BSN		Penilaian KOMINFO tentang peringkat tata kelola TI BSN
4. Layanan Jasa Informasi Standardisasi	3 paket layanan	
4.1 Layanan Penelusuran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (inquiry)		<ul style="list-style-type: none"> • Data penelusuran standardisasi • Data penelusuran penilaian kesesuaian
4.2 Layanan permintaan Informasi referensi/standar (non transaksi)		Data permintaan informasi
4.3 Layanan Penjualan Dokumen SNI dan Standar Internasional		Data penjualan SNI dan standar lainnya

Sedangkan rincian kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8.
Kegiatan dan Output Kegiatan
Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi Tahun 2014

Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Output kegiatan
Jejaring Pendidikan	2 paket	
1. Jejaring Pendidikan Tinggi		
1.1 Penyusunan kebijakan pendidikan tinggi		2 (dua) konsep Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Standardisasi dan Kualifikasi Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi, serta 1 (satu) Surat Keputusan Deputi IPS untuk merevisi Kurikulum (S1 dan S2) dan Bahan Ajar Standardisasi
1.2 Analisa implementasi dan sosialisasi pendidikan standardisasi di PT		Dari 32 PT yang telah MoU dengan BSN, 11 PT mengajarkan standardisasi di Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknologi Pangan serta Fakultas Teknologi Perikanan

Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Output kegiatan
<p>3.3 Promosi kepada instansi teknis/LPK</p> <p>3.4 Promosi SNI kepada publik</p>		<p>2 kegiatan sosialisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 paket promosi tentang SPK melalui videographic ; • Peningkatan kerjasama dengan Pemda melalui 2 kegiatan sosialisasi. • 1 paket materi publikasi SNI (luar ruang, sosial media, media massa); • Peningkatan <i>awareness</i> dan pemahaman masyarakat terhadap SNI melalui 6 kegiatan promosi
<p>4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Standardisasi</p> <p>4.1 Pengembangan Jejaring masyarakat standardisasi</p> <p>4.2 Pembinaan masyarakat dalam standardisasi</p> <p>4.3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum standar Internasional</p> <p>Layanan Jasa Diklat Standardisasi</p> <p>1. Layanan Pelatihan <i>Public Training</i></p> <p>2. Layanan Pelatihan <i>In House Training</i></p>	<p>3 paket</p> <p>52 Pelatihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan total anggota MASTAN sebanyak 4151 orang; • Peningkatan <i>Capacity Building</i> Fasilitator SNI Award 2014 melalui 5 kegiatan ToT; • Peningkatan partisipasi masyarakat melalui komunitas penggerak penerapan SNI <p>Peningkatan kerjasama stakeholder melalui sidang ISO/COPOLCO ke 36.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 (tujuh) kali penyelenggaraa pelatihan public • 45 (empat puluh kali) pelatihan <i>in house training</i> • <i>Feedback</i> pengguna pelatihan

B. Pencapaian Kinerja

1. Persentase masyarakat yang peduli terhadap standarisasi berdasarkan capaian kinerja dari output kegiatan yang dihasilkan PUSIDO dan PUSDIKMAS

Tabel 9.
Capaian IKU 2013 – 2014 dan Target IKU 2014

No.	Unsur Indikator Kinerja	Capaian 2013	Target 2014	Capaian 2014
1.	Jumlah pemanfaat paket informasi standarisasi (<i>online</i> dan <i>offline</i>)	4.674	5.000	8.038
2.	Jumlah pengguna layanan informasi standarisasi	40.875	40.875	41.370
3.	Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standarisasi	445.203	431.280	590.464
4.	Jumlah peserta pendidikan standarisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa)	3.745	4.200	5.955
5.	Jumlah peserta pelatihan standarisasi (instruktur & peserta)	1.014	1.300	1.131
6.	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian	14.630	14.600	16.961
7.	Jumlah peningkatan anggota Masyarakat Standarisasi	266	376	127
8.	Jumlah peserta SNI Award	180	180	159
	TOTAL	510.587	497.811	664.205

Pada tahun 2014 jumlah masyarakat yang peduli terhadap standarisasi mencapai 664.205 orang. Capaian ini jauh melebihi target dari 497.811 orang yang ditargetkan di tahun 2014. Dengan demikian, terkait persentase masyarakat yang peduli terhadap standarisasi, pencapaian kinerja ke deputian IPS tahun 2014 melebihi target yang telah ditetapkan (10%), yaitu meningkat sebesar 33,43%.

2. Indeks kepuasan pelanggan layanan jasa Informasi dan Diklat standarisasi

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa informasi dan diklat standarisasi dilakukan melalui survei kepada pelanggan, yaitu pengguna informasi standarisasi dan peserta pendidikan dan pelatihan standarisasi. Adapun mekanisme survei yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 10.**Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM di Kedeputusan IPS**

Item Survei	Layanan Jasa Informasi	Layanan Jasa Diklat
Metode	<i>Accidental Sampling*</i>	<i>Total Sampling**</i>
Jumlah responden	150 orang	1107 orang
Waktu Pelaksanaan	Maret s.d Desember	Januari s.d Desember
Tempat Pelaksanaan	Perpustakaan BSN	Lokasi Pelatihan

*) Kuesioner dibagikan kepada pengunjung perpustakaan yang datang berkunjung

***) Kuesioner dibagikan kepada seluruh peserta dan *personal in charge* pelatihan

Instrumen survei kepuasan pelanggan berupa daftar pertanyaan yang berjumlah 14 pertanyaan, diantaranya terkait dengan SOP, kecepatan, kesopanan, keamanan, konsisten terhadap jam layanan, kewajaran tarif, kedisiplinan petugas serta waktu layanan yang dijanjikan. Adapun hasil pengolahan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11.**Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi Dan Layanan Jasa Diklat Standardisasi**

No.	Elemen Pertanyaan	Jasa Informasi		Jasa Diklat	
		Score	IKP	Score	IKP
1.	Kemudahan Prosedur Layanan	4,24	84,71	3,04	75,97
2.	Persyaratan Pelayanan sesuai dengan ketentuan	4,18	83,66	3,03	75,76
3.	Kejelasan petugas pelayanan	4,05	80,98	2,96	73,99
4.	Kedisiplinan petugas	4,23	84,51	3,08	77,07
5.	Tanggung jawab petugas	4,23	84,64	3,27	81,65
6.	Kemampuan petugas	4,10	82,03	3,27	81,72
7.	Kecepatan pelayanan	4,23	84,64	3,10	77,54
8.	Keadilan dalam pelayanan	4,03	80,59	3,22	80,48
9.	Keramahan petugas	4,35	87,06	3,46	86,52
10.	Kewajaran biaya layanan	4,06	81,11	3,11	77,67
11.	Kesesuaian biaya dengan ketentuan yang berlaku	4,16	83,14	3,56	87,48
12.	Waktu layanan	4,25	85,10	3,16	79,02
13.	Kenyamanan tempat layanan	4,05	81,05	3,23	80,66
14.	Keamanan saat layanan	4,18	83,53	3,35	83,80
15.	Lokasi penyelenggaraan yang representatif	N/A	N/A	3,48	86,97

16.	Fasilitas dan ruangan memadai	N/A	N/A	3,29	82,13
17.	Materi sesuai dengan sasaran	N/A	N/A	3,08	76,88
18.	Sistematika penyajian mudah dipahami	N/A	N/A	3,12	77,97
19.	Materi mutakhir	N/A	N/A	3,22	80,56
20.	Instruktur menguasai materi	N/A	N/A	2,88	72,02
21.	Instruktur meyampaikan materi secara jelas	N/A	N/A	3,04	76,03
22.	Instruktur memberikan motivasi bagi peserta	N/A	N/A	3,04	76,10
23.	Instruktur mampu mengelola waktu	N/A	N/A	3,12	77,97
24.	Asisten instruktur membantu kelancaran proses pelatihan	N/A	N/A	3,18	79,47
	Rata-rata	4,17	83,34	3,18	79,39
	IKP Rata-rata Layanan Kedeputian IPS	81,36			

Dari hasil pengolahan IKP tersebut di atas, diketahui bahwa Kepuasan pelanggan jasa informasi melalui Perpustakaan BSN berada pada kategori "SANGAT BAIK", sedangkan untuk layanan jasa diklat standardisasi dalam rentang kategori penilaian "BAIK". Secara keseluruhan pencapaian target Indeks Kepuasan pelanggan layanan publik di Kedeputian IPS, tertuang dalam tabel 12 :

Tabel 12.
Capaian dan Target Indeks Kepuasan Pelanggan
Layanan Jasa Informasi Standardisasi dan Layanan Jasa Diklat
Tahun 2013-2014

Indeks Kepuasan Pelanggan	Target 2014	Capaian 2014
Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi	80	83,34
Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi	80	79,39
Nilai rata-rata IKP	80	81,36

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan rata-rata pada layanan jasa di Kedeputian IPS sebesar 81,36. Nilai ini masuk ke dalam kategori BAIK sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap standarisasi

Tahun 2014 BSN bekerjasama dengan Universitas Surabaya (UBAYA) untuk melakukan survey tentang tingkat persepsi masyarakat terhadap standarisasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi adalah koleksi data primer, survei dan observasi lapangan. Sedangkan metodologi penyampaian pertanyaan kepada responden, terbagi atas : (1) Pertanyaan tertutup (pilihan jawaban *multiple choice*, hanya satu jawaban yang benar), (2) Pertanyaan urutan prioritas (pilihan jawaban *multiple choice*, jawaban diberi ranking sesuai jawaban responden); (3) Pertanyaan skala sikap/likert (responden memberikan jawaban berupa sikap, seperti : sangat setuju s.d sangat tidak setuju) ; dan (4) Pertanyaan terbuka (responden dapat memberikan jawaban apapun). Kemudian untuk mengukur tingkat validitas dan variabilitas data, kolektor data memastikan bahwa responden dapat menjawab dengan benar maksud dalam setiap pertanyaan kuesioner. Sedangkan untuk pertanyaan *multiple choice*, cukup dengan validasi isi, akan tetapi dalam pertanyaan dengan metode skala *likert*, perlu penambahan validasi konstruk (secara statistik).

Dibawah ini disampaikan tabel perbandingan pelaksanaan survei tingkat persepsi masyarakat tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 13.

Perbandingan Survei Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Standardisasi

No	Komponen	Survei 2013	Survei 2014	Keterangan
1.	Lokasi dan partner kerjasama	10 kota besar yang sudah dilakukan sosialisasi standarisasi a. Makassar b. Medan c. Riau d. Jakarta e. Bandung f. Yogyakarta g. Surabaya	16 kota, penambahan 6 kota yang BSN pernah lakukan sosialisasi a. Makassar b. Medan c. Riau d. Jakarta e. Bandung f. Yogyakarta g. Surabaya	Penambahan lokasi untuk melihat tingkat persepsi di kota tersebut, dimana BSN juga melakukan sosialisasi standarisasi

		h. Samarinda i. Bali j. Manado	h. Samarinda i. Bali j. Manado k. Palembang l. Bogor m. Gorontalo n. Palu Banjarmasin	
2.	Target responden	4.000	3.000	
3.	Komposisi responden a. Konsumen b. Pelaku usaha c. Akademisi d. Pemerintah	Realisasi: 3.950 a. 13 % b. 41 % c. 28 % d. 18 %	Realisasi : 2.920 a. 15% b. 27% c. 34% d. 24 %	
4.	Indeks Persepsi	72,9	67,67	
5.	Elemen Kuesioner			
	a. Pengetahuan tentang BSN	9, 27	11,79	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2014 pengetahuan masyarakat tentang BSN meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan <i>trend</i> positif dari masyarakat akan kelembagaan BSN. • Mayoritas responden sudah paham bahwa BSN bertugas menetapkan SNI. • Informasi paling banyak tentang BSN masih di dapat dari media cetak, televisi dan kegiatan yang diselenggarakan BSN. Sarana media online masih belum banyak menjadi sumber informasi.
	b. Pengenalan Tentang SNI	17, 40	17,74	<p>Hasil survei 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan masyarakat tentang SNI meningkat, meski tidak naik secara signifikan. • Mayoritas yang tidak tahu SNI juga tidak tahu BSN, sedangkan yang kenal BSN juga tahu tentang SNI. Diartikan bahwa eksistensi BSN lebih

				<p>banyak terbantu dengan pengetahuan masyarakat tentang SNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesi yang belum banyak tahu tentang SNI adalah para pelaku UKM, sementara profesi yang paling banyak mengetahui tentang SNI adalah PNS, karyawan BUMN/industri. Untuk itu, UKM perlu menjadi target utama dalam sosialisasi SNI termasuk prosedur sertifikasi SNI.
	c. Pemahaman dan Persepsi mengenai Sertifikasi SNI	17, 28	8,76	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka untuk elemen ini, disebabkan rendahnya <i>score</i> pada pertanyaan mengenai pengetahuan masyarakat tentang institusi mana yang melakukan sertifikasi SNI. • Mayoritas masih berpikir bahwa BSN yang mensertifikasi SNI. • Responden beranggapan bahwa proses sertifikasi SNI masih merupakan langkah yang tidak mudah serta pemerintah masih setengah hati dalam memberikan keringanan pembiayaan dalam mengurus sertifikasi SNI. • Diharapkan sosialisasi mengenai mekanisme penerapan SNI harus terus digalakkan khususnya kepada pelaku usaha kecil menengah
	d. Persepsi mengenai Penerapan SNI	19.58	16,52	<ul style="list-style-type: none"> • Responden mempunyai persepsi yang positif mengenai produk ber

				<p>SNI menjamin kualitas dan aman digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas persen responden (40,3%) mempertimbangkan tanda SNI dalam memilih produknya, menjadi prioritas kedua setelah tanda halal. • Namun demikian, angka persepsi justru turun pada pertanyaan mengenai produk ber SNI mudah didapatkan dan pengawasan terhadap produk ber SNI di pasaran telah sesuai harapan. • Masyarakat masih beranggapan bahwa produk ber SNI masih sulit ditemukan di pasaran dan pengawasan terhadap produk ber SNI di pasaran belum sesuai yang diharapkan. • BSN perlu mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan penerapan SNI, sehingga produk barang yang beredar akan semakin banyak yang ber SNI.
	e. Tingkat Partisipasi	9,41	12,85	<p>Tingkat partisipasi dilihat dari segi penerapan SNI untuk pelaku usaha adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responden yang menyatakan belum menerapkan SNI, lebih banyak beralasan bahwa mereka belum tahu standar apa yang sesuai dengan produk mereka, biaya pengurusan yang mahal serta tidak tahu tentang

				<p>proses sertifikasi SNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responden dari konsumen dilihat dari pertanyaan mengenai pertimbangan tanda SNI saat memilih produk, dimana sebanyak 52 % menjawab iya kadang-kadang dan 40,3 % iya selalu dan sebanyak 2,3 % yang tidak mempertimbangkan tanda SNI saat memilih produk mempunyai alasan : <ul style="list-style-type: none"> (a) tidak ada kewajiban memilih produk ber-SNI ; (b) tidak faham, apa beda produk ber-SNI (c) tidak ada produk tanpa SNI namun kualitasnya lebih baik (d) ada produk ber-SNI yang palsu (e) produk ber-SNI belum tentu kualitasnya baik
--	--	--	--	--

Survei tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi pada tahun 2014 ini mengalami penurunan, utamanya dari pertanyaan yang terkait dengan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai sertifikasi SNI. Artinya masih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha yang belum paham apa dan bagaimana mekanisme/prosedur untuk sertifikasi SNI. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi SNI yang menjangkau masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah sehingga mereka tidak kebingungan dalam pelaksanaan sertifikasi SNI. Masyarakat masih beranggapan bahwa BSN yang melakukan sertifikasi SNI.

Untuk pelaksanaan survei tingkat persepsi tahun depan, pertanyaan untuk survei tingkat persepsi tidak akan digabung dengan survei tingkat partisipasi. Penggabungan dua survei menjadi satu kuesioner pada tahun 2014 ini, menjadikan responden jenuh karena kebanyakan pertanyaan sehingga dikhawatirkan

mengurangi keakuratan jawaban yang diberikan. Disamping itu, guna peningkatan nilai indeks pada survei persepsi, komposisi responden dapat dibedakan antara responden yang telah mengetahui SNI dan yang masih awam, demikian juga dengan demografi responden di setiap kota yang menjadi tujuan survei diharapkan lebih seragam.

Untuk ketiga indikator kinerja yang sudah di uraikan di atas, dapat dilihat pencapaian Kedeputan IPS dalam tabel 14 di bawah ini :

Tabel 14
Capaian IKU IPS TA. 2014

Indikator	Realisasi	Keterangan
1. Persentase Peningkatan Masyarakat yang Peduli Terhadap Standardisasi	33,43 %	Di atas target 10%
2. Indeks Kepuasan Pelanggan layanan informasi standardisasi	81,36	Di atas target 80
3. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap standardisasi	67,67	Di bawah target 75

3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi diberikan alokasi pendanaan kegiatan yang berasal dari Rupiah Murni maupun dari Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adapun jumlah dan kondisi anggaran Kedeputan IPS dalam kurun waktu 2013 s.d 2014, adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 15 :

Tabel 15
Perbandingan Kinerja anggaran Kedeputian IPS
Tahun 2013 dan 2014

SUMBER ANGGARAN	KOMPONEN	JUMLAH ANGGARAN KEDEPUTIAN IPS		KETERANGAN (*)
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	
DIPA	Pagu	Rp. 14.699.329.000,-	Rp. 9.621.793.000,-	Turun 34,6%
	Penyerapan	Rp. 13.929.522.541,-	Rp. 9.491.683.813,-	
	Persentase Penyerapan	94,7%	98,65%	Naik 3,95%
PNBP	Target Penerimaan	Rp. 1.900.510.060,-	Rp. 2.107.454.700,-	Naik 10,6 %
	Realisasi Penerimaan	Rp. 1.957.740.096,-	Rp. 2.325.826.762,-	
	Persentase Realisasi penerimaan	103 %	110,4 %	Naik 7,4 %
	Pagu Penggunaan	Rp. 1.660.450.357,-	Rp. 1.926.048.000,-	
	Realisasi Penggunaan	Rp. 1.546.678.125,-	Rp. 1.821.157.676,-	
	Persentase Realisasi Penggunaan	93,15 %	94,55 %	1,4 %

Keterangan :

(*) *Persentase perbandingan tahun 2014 terhadap tahun 2013*

Dari tabel di atas terlihat bahwa pagu anggaran Kedeputian IPS pada tahun 2014 mengalami penurunan sejumlah 34,6%, yaitu sejumlah Rp. 14.699.329.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 9.621.793.000,- pada tahun 2014. Sedangkan untuk dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), target penerimaan Kedeputian IPS tahun 2014 sejumlah Rp. 2.107.454.700,- atau naik 10,6 % dari target tahun 2013 sejumlah Rp. 1.900.510.060,-. Demikian juga dengan realisasi penerimaan PNBP Kedeputian IPS tahun 2014 mengalami kenaikan 7,4 % dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan - Badan Standardisasi Nasional TA. 2014 dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja TA. 2014 telah dapat dipenuhi oleh Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan dengan tingkat capaian persentase peningkatan jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi adalah 33,43%, Indeks kepuasan pelanggan layanan standardisasi 81,36 dan Indeks Persepsi Masyarakat terhadap standardisasi sebesar 67,67.

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya guna meningkatkan kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.

Kiranya LAKIP Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan BSN Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi di masa mendatang.